

TESIS

**PRAKTEK PARADIPLOMACY
PEMDA DIY DALAM EXPLOITASI AIR SUNGAI BAWAH TANAH
DI GUA BRIBIN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2004-2015**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-2
Pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :

Rizqi Sandra Zenita

20141060011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status keistimewaan atau otonomi khusus. DIY juga merupakan sebuah daerah otonomi setingkat propinsi di Indonesia dengan ibukota propinsinya adalah Yogyakarta, sebuah kota dengan berbagai predikat, baik dari sejarah maupun potensi yang ada. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini terdiri dari lima kabupaten/kota yaitu, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 1. Peta Provinsi DIY



Altovart.blogspot.com

Secara umum keadaan geografis Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari daerah dataran yang berada pada kaki gunung Merapi (pada ketinggian 900 meter diatas permukaan air laut) dan miring kearah Selatan sampai di daerah pantai Samudra Indonesia, yang lazim disebut pula sebagai pantai Laut Selatan (bhs. Jawa: Segara Kidul). Selanjutnya daerah yang terdiri dari gunung/pegunungan

yaitu lereng Merapi di Utara, pegunungan Menoreh di bagian Barat, dan pegunungan Selatan (Gunung Kidul) di bagian sebelah Tenggara yang disebut pegunungan Seribu.¹

Provinsi DIY sebagai salah satu provinsi yang menyandang keistimewaan di negara RI tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan kebutuhan untuk membina komunikasi dan interaksi serta hubungan kemitraan baik dengan provinsi lain di Indonesia maupun dengan pemerintah negara lain. Pertimbangan yang mendasari tidak semata-mata dalam upaya menjalin hubungan persahabatan yang saling pengertian di antara provinsi tetapi juga sebagai upaya untuk menggalang kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) dalam berbagai bidang pelayanan publik.

Dalam pembangunan daerah, peran pemerintah daerah sangat strategis dalam penentuan arah kebijakan pembangunannya, disamping dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan suatu wilayah dinyatakan berhasil salah satunya tercermin dalam keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi wilayahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memahami dengan baik perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dan potensi-potensi unggulan daerahnya, agar kebijakan pembangunan mampu mendorong dinamika perekonomian yang terjadi.

Harus diakui bahwa setiap provinsi di negara Indonesia pada khususnya termasuk Provinsi DIY dan provinsi di negara-negara manca pada umumnya menghadapi tantangan yang sama dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi provinsi DIY tantangan tersebut adalah luas wilayah yang relatif kecil, mengalami kekeringan, dan sumber keuangan yang terbatas. Hal tersebut telah dialami khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibukota di Wonosari yang merupakan daerah yang kurang subur. Gunungkidul yang merupakan daerah pegunungan kapur dan terjal ini memiliki jumlah penduduk

¹ Daerah Istimewa Yogyakarta : pada <http://yogya2.wasantara.net.id/tour/about.htm>

mempunyai struktur geologi yang didominasi batuan kapur. Dengan demikian, sumberdaya air utama yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Gunungkidul adalah dari aliran sungai bawah tanah yang terdapat di daerah tersebut. Sebenarnya Gunungkidul yang air tanahnya merupakan daerah karst mempunyai peluang yang tinggi untuk dikembangkan sebagai sumber air minum karena jumlahnya sangat melimpah yang mendukung suplai air pada musim kemarau.

Namun demikian, sumberdaya air tanah tersebut sulit untuk dimanfaatkan karena kedalamannya bervariasi yaitu antara 50-100 m di bawah permukaan tanah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemda DIY telah melakukan upaya pemompaan sungai bawah tanah di Gua Bribin Kabupaten Gunungkidul serta pembangunan jaringan distribusi.

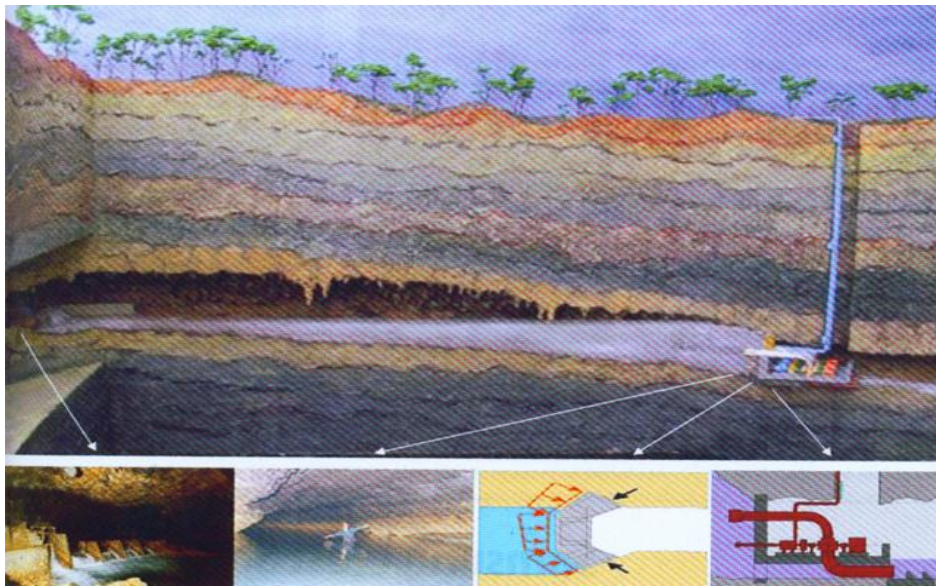
Sistem sungai bawah tanah di Gua Bribin merupakan sistem sungai utama di kawasan karst yang mempunyai debit aliran besar sepanjang tahun. Untuk meningkatkan kapasitas layanan distribusi air tanah di kawasan karst, maka Pemda DIY membangun bendungan sungai bawah tanah di Gua Bribin melalui kerjasama dengan BATAN dan Pemerintah Jerman melalui Universitas Karlsruhe. Rintisan tersebut telah menghasilkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kabupaten Gunungkidul, Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Universitas Karlsruhe Jerman untuk melakukan Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin Kabupaten Gunungkidul.³

Banyak usaha yang telah dilakukan oleh Pemda DIY guna untuk mengatasi masalah kekeringan ini, yaitu dengan Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul melalui kerjasama dengan BATAN dan Universitas Karlsruhe Jerman. Pada tahun 2002 telah dimulainya Rencana Pengelolaan Sumber Air Bawah Tanah di Gua Bribin melalui kerjasama dengan BATAN dan Jerman sebagai salah satu usaha untuk menyempurnakan sistem eksploitasi air bawah tanah yang ada di daerah ini,

³ <http://bppsam.com>

dengan harapan dapat memecahkan masalah kelangkaan air di musim kemarau. Proyek ini menjadi proyek penggalian sungai bawah tanah pertama di dunia. Proyek yang dikerjakan antara BATAN, Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Indonesia dalam Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin Gunungkidul ini telah menelan biaya sebesar Rp 70 miliar.⁴

Gambar 3. Keadaan sungai bawah tanah di Gua Bribin



www.skyscrapercity.com

Dana sebesar itu, seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Jerman melalui Universitas Karlsruhe, Jerman. Dana tersebut digunakan untuk pembelian alat berat dan biaya pengeboran, sedangkan dalam hal ini Kimpraswil dan Departemen Pertanian hanya membuat jalan ke lokasi pengeboran. Lokasi pengeboran di Bribin, Kecamatan Semanu atau sekitar 20 kilometer sebelah timur kota Wonosari ini, daerahnya cukup terjal karena berada di daerah pegunungan kapur. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2004 dilakukan pengeboran awal serta pada bulan Agustus 2004 juga dilaksanakannya penandatanganan kerjasama oleh pimpinan masing-masing lembaga yang berisi tentang kerjasama teknis pengelolaan air sungai bawah tanah di daerah karst di Yogyakarta (Gunungkidul). Kemudian tahun 2010 penyerahan Sungai Bawah Tanah tersebut dari Jerman untuk Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Gunungkidul sekaligus ditandatanganinya pula

⁴ Wawancara dengan penjaga bendungan Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Bribin II di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul tanggal 23 Agustus 2015.

Memorandum of Understanding antara pihak Universitas Karlsruhe dan Pemerintah DIY. Pengeborannya sudah mencapai kedalaman 19 meter dari permukaan tanah. Pengeboran sampai ke dinding gua Bribin diperkirakan sedalam 105 meter. Didalam gua tersebut, nantinya akan dibangun bendungan air dan pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai di bawah tanah. Listrik yang dihasilkan dari bendungan itu, nantinya akan dipergunakan untuk mengangkat air sungai bawah tanah ke permukaan dan langsung didistribusikan ke masyarakat Gunungkidul.

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun arah dan sasaran yang hendak menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Pemda DIY dalam pengelolaan kerjasama internasional.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik paradiplomacy yang dilakukan Pemda DIY.
- c. Untuk mengetahui Kerjasama Pemda DIY dengan Jerman dalam Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi yakni :

- a. Secara praktis, diharapkan dari Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gunungkidul dapat memberikan gambaran keadaan sungai bawah tanah yang sesungguhnya. Selain itu, informasi ini sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk program pemanfaatan sungai bawah tanah di daerah Gunungkidul untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Kemudian dari eksploitasi air sungai bawah tanah di Gua Bribin tersebut dapat mempererat hubungan kerjasama antara Jerman dengan Pemda DIY.
- b. Bagi pihak akademis, diharapkan tesis ini diyakini dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian Praktik Paradiplomacy sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan

bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional dengan kota-kota lain di berbagai Negara di dunia.

C. Rumusan Masalah

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat mengundang munculnya aktor baru yakni pemerintah daerah/kota dalam interaksi hubungan internasional. Otonomi daerah membuka gerbang bagi dunia luar kepada *local government to government*, bahkan *person to person* untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana proses kerjasama yang dilakukan Pemda DIY dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015?”

D. Kerangka Teori

1. Paradiplomasi

Perkembangan teknologi informasi komunikasi, dan munculnya isu-isu kompleks dalam hubungan internasional yang melewati batas-batas negara merupakan arus globalisasi yang semakin tidak mengenal ruang dan waktu melahirkan berbagai macam bentuk dan cara-cara diplomasi yang baru.

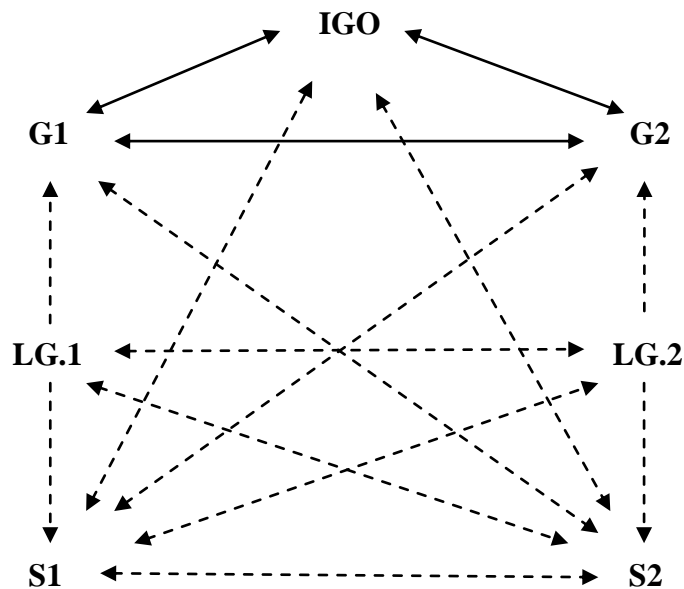
Letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memakmurkan dan pemeratakan pembangunan disegala bidang terhadap pulau dan kepulauan NKRI ditengah regionalism yang terus berkembang. Sehingga, kebijakan desentralisasi Pemerintah Indonesia ditetapkan dan diyakini merupakan salah satu solusi yang efektif dan efisien untuk pemeratakan pembangunan di setiap daerah di kepulauan Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh Indonesia adalah kebijakan otonomi daerah.

Otonomi ini adalah salah satu bentuk pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah

daerah ditiap provinsi dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang teguh terhadap Undang-Undang Dasar Negara. Dimana hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif efisien, dan berwibawa demi mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Munculnya “aktor baru” bernama pemerintah daerah (*local government*) mempengaruhi pengembangan model hubungan yang bersifat transnasional. Hal itu bisa digambarkan pada skema berikut :

Skema 1

Pola Hubungan Internasional bersifat Transnasional hal mana Local Government (Pemerintah Daerah) merupakan aktor/pelaku “baru” hubungan Internasional ⁵



Pola Hubungan Lama/Klasik

———— Hubungan Dalam Negeri

----- Hubungan Transnasionalisme

G = Government = Pemerintah Pusat

LG = Local Government = Pemerintah Daerah

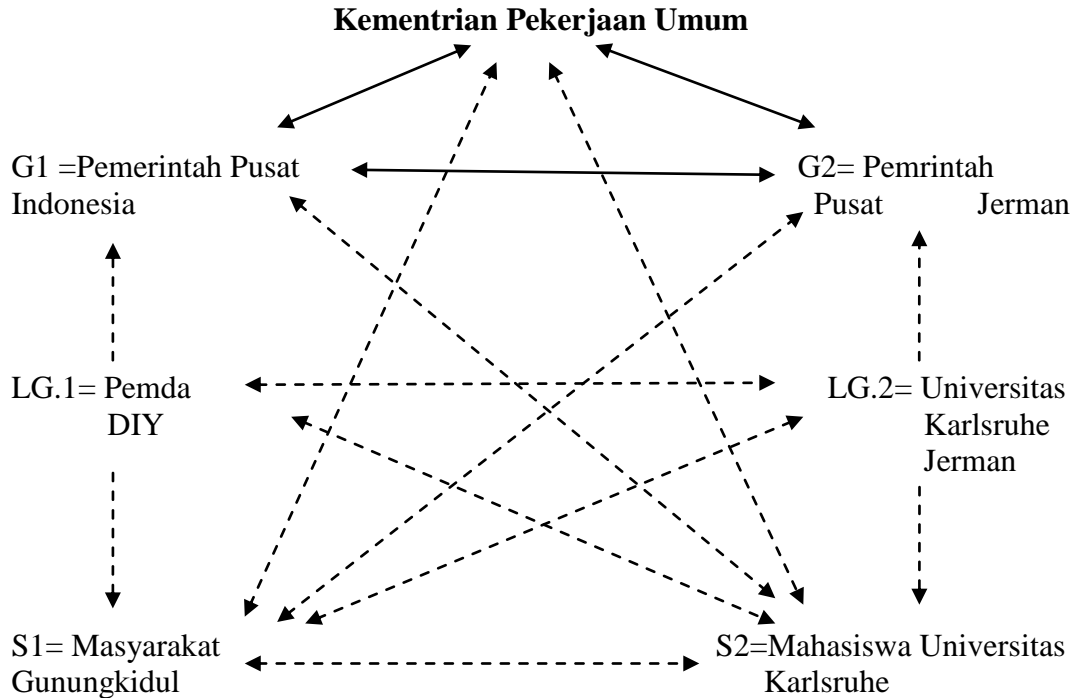
S = Society = Masyarakat (termasuk di dalamnya adalah Masyarakat Bisnis)

IGO= Inter Governmental Organization =Lembaga Internasional

⁵ Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional*, BIGRAF Publishing, hal 52

Skema 2

Aplikasi dari Pola Hubungan Internasional bersifat Transnasional yaitu Praktek Paradiplomacy Pemda DIY dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015



Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan Daerah, dewasa ini telah terjadi perkembangan baru yang penting pada proses penyempurnaan sistem otonomi daerah yang berkelanjutan yang telah pula membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam hubungan luar negeri.

Perkembangan situasi dunia, aktor, dan teknologi informasi membuat arah diplomasi tradisional bergeser pada diplomasi yang lebih modern dan beragam. Saat ini dalam pendefinisian diplomasi terbagi menjadi dua bagian penting yaitu diplomasi tradisional atau diplomasi konvensional (*first track diplomacy*) atau diplomasi modern yang disebut diplomasi publik (*second track diplomacy*) dan (*multitrack diplomacy/paradiplomacy*). Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Istilah '*Paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an oleh ilmuwan asal

Bosque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah '*Parallel diplomacy*' menjadi '*Paradiplomacy*'. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing. Keberadaan paradiplomasi menjadi fenomena yang kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non negara dalam arena hubungan internasional.⁶

Kerjasama internasional terbentuk karena interaksi internasional yang meliputi bidang, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Kerjasama dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum.

Menurut Zartman, Kerjasama Internasional adalah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, akibat dari adanya interaksi yang melewati batas-batas geografis suatu negara.⁷

Kemudian menurut Holsti kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu Negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.

Menurut Duchacek (1990) telah mencermati fenomena makin berperannya pemerintah sub nasional dalam hubungan internasional dimana pemerintah sub nasional melakukan apa yang disebut dengan *paradiplomacy*. Oleh Duchacek dan Soldatos terminologi *paradiplomacy* digunakan untuk menunjuk aktifitas-aktifitas yang paralel, terkoordinasi, pelengkap terhadap, atau

⁶ Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta.

⁷ William Zartman, 2010, *International Cooperation : The Extents and Limits of Multilateralism*, Cambridge University Press.

bahkan terkadang bertentangan dengan *macro-diplomacy* atau diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat (nasional).

Duchachek menjelaskan paradiplomasi dalam tiga tipe. Tipe pertama adalah *transborder paradiplomacy*. Tipe paradiplomasi ini menunjuk pada hubungan institusional, formal ataupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun secara geografis wilayahwilayah sub nasional tersebut berbatasan langsung. Tipe paradiplomasi yang kedua, *transregional paradiplomacy*, hubungan diplomasi yang dilakukan antara dua atau lebih pemerintah sub nasional yang wilayahnya tidak berbatasan secara langsung namun negara dimana unit-unit sub nasional tersebut berada berbatasan secara langsung. Sedangkan tipe ketiga adalah *global paradiplomacy* yang merupakan aktifitas hubungan antara pemerintah-pemerintah sub nasional di dua atau lebih negara yang tidak berbatasan.

Sementara itu Soldatos (1990), secara fungsional atau berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi, membagi dua tipe paradiplomasi. Tipe pertama adalah *global paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Sebagai contoh tipe paradiplomasi ini adalah kebijaksanaan yang diambil Gubernur New York dan Gubernur New Jersey yang melarang pendaratan pesawat-pesawat Uni Soviet di wilayahnya sebagai reaksi atas penembakan pesawat Korean Airlines. Mengingat pemerintah sub nasional biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi.

Tipe kedua klasifikasi Soldatos adalah *regional paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Apabila isu-isu tersebut menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung (*geographical contiguity*), Soldatos menyebutnya sebagai *macroregional paradiplomacy* sebaliknya bila komunitas tersebut tidak berbatasan secara langsung disebutnya sebagai *microregional paradiplomacy*. Lazimnya regional paradiplomacy ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah sehingga jarang menimbulkan kontroversi. Dorongan bagi pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi dapat berasal dari lingkungan baik dari

Negara maupun unit sub nasional itu sendiri, dan dari faktor-faktor eksternal/internasional.

Melihat kondisi politik internasional dan pola diplomasi yang berubah, pemerintah-pemerintah diseluruh dunia dituntut untuk merumuskan dan merancang rancangan kebijakan luar negeri yang disesuaikan dengan kondisi dunia internasional yang sedang mengalami globalisasi demi memelihara eksistensi dan peranannya dalam dunia internasional. Globalisasi yang terjadi menyebabkan terbukanya akses bagi masyarakat internasional untuk terlibat secara langsung dalam mempengaruhi dan memberikan sumbangan terhadap dunia internasional.

2. Teori Manajemen Internasional

Perekonomian global telah menjadi tantangan bagi semua negara yang memiliki banyak perusahaan besar untuk go internasional. Banyak negara di dunia ini yang secara dramatis mengalami lonjakan peningkatan pada jumlah perusahaannya yang go internasional demikian juga pertumbuhan penjualannya dari dan ke berbagai negara lain.

Seiring dengan adanya perubahan perekonomian global secara manajerial juga diikuti adanya perubahan pada pengelolaan suatu usaha, utamanya bagi yang sudah melakukan kegiatan usaha di berbagai negara. kegiatan usaha yang sudah dilakukan antar negara menjadi indikasi adanya peningkatan kegiatan ekonomi khususnya peningkatan perdagangan dan investasi.

Secara nyata dapat diketahui bahwa manajemen merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang lebih bersifat mikro. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi baik secara mikro maupun makro. Dalam manajemen dapat dipelajari bagaimana suatu usaha atau kegiatan ekonomi dikelola agar menjadi efisien sehingga dapat diperoleh keuntungan.

Dalam bukunya Uci Yulianti yang berjudul *Manajemen Internasional : Suatu Tinjauan Sumberdaya Manusia* dijelaskan bahwa Manajemen Internasional adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena

lingkungan internasional. Dalam Hodget disebutkan bahwa *international management is the process of applying management concepts and techniques in multinational environment*. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan internasional merupakan proses penerapan konsep-konsep dasar dan teknik manajemen dalam lingkungan internasional.⁸

Oleh karena lingkungan internasional menjadi tempat penerapan manajemen, maka perusahaan yang sudah mampu melakukan manajemen internasional biasanya disebut sebagai perusahaan multinasional. Praktek manajemen internasional yang dilakukan oleh berbagai perusahaan multinasional sangat diwarnai oleh berbagai gaya manajemen dari mana multinasional berasal. Bahkan gaya manajemen dan budaya negara dimana ada kantor cabang atau tempat ekspansi perusahaan multinasional juga berpengaruh terhadap praktek manajemen internasional.

Di dalam manajemen internasional Pengambilan keputusan dan pengendalian adalah dua fungsi penting. Pemakaian sejumlah pengambilan keputusan mendapat perhatian dari manajemen internasional. Perusahaan multinasional mengatur pengoprasian usaha patungan atau kerjasama melalui sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Artinya apabila pengambilan keputusan dilakukan secara sentralisasi maka berarti kantor pusat yang melakukannya. Apabila pengambilan keputusan dilakukan secara desentralisasi maka yang melakukan adalah kantor cabang atau operasional di luar negeri. Pengambilan keputusan apapun yang dilakukan tidak lain adalah untuk membantu cabang dalam rangka merespon kondisi ekonomi dan atau barangkali dalam rangka memusatkan segala sesuatu seperti pengembalian investasi yang telah dilakukan di luar negeri. Suatu waktu barangkali pengambilan keputusan merupakan hasil dari berbagai macam budaya. Artinya dalam pengambilan keputusan sangat diwarnai dan dipengaruhi budaya.

Kemudian Pengendalian melibatkan hasil evaluasi di dalam perencanaan laporan dan keputusan apa saja yang akan diambil. Fungsi pengendalian adalah konsep dan kepraktisan untuk pengambilan keputusan. Seperti pendekatan

⁸ Uli Yulianti, 2006, *Manajemen Internasional : Suatu Tinjauan Sumberdaya Manusia*, UMM Press, Malang.

pengambilan keputusan, pendekatan yang digunakan oleh banyak Negara dalam mengendalikan operasi untuk kurun waktu jangka panjang. Khususnya untuk keputusan besar perusahaan maka keseluruhan bagian perusahaan mencoba untuk mengendalikan semua operasi menjadi utuh dan terkoordinasi antar unit.

Dari Teori manajemen Internasional ini, penulis dapat mengaplikasikan dalam masalah diatas mengenai Praktek Paradiplomacy Pemda DIY dalam Ekxploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul melalui kerjasama dengan Pemerintah Jerman yaitu adanya proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional untuk lebih mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan dalam hal kerjasama melalui sentralisasi atau desentralisasi.

E. Tinjauan Pustaka

Proses globalisasi telah menawarkan peluang kerjasama internasional dengan telah membawa kota-kota menjadi lebih dekat. Hal ini memperluas cakupan kerjasama antar daerah dalam suatu Negara antara satu daerah dengan pihak luar Negeri. Kerjasama yang terjadi ini dapat terjalin antara pemerintah daerah dengan pemerintah negara lain. Artinya hubungan kerjasama tidak harus selalu berupa hubungan antar negara, melainkan dapat pula berupa hubungan kerjasama antar kota. Bentuk kerjasama antar daerah ini, menurut Permendagri No. 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Menurut Andre Lecours seorang Professor Ilmu Politik di University Ottawa dalam *discussion papers Political Issues of Paradiplomacy : Lessons from the Developed World* bahwa Paradiplomacy seperti yang dilakukan oleh pemerintah sub negara berkembang masyarakat dapat memiliki banyak fokus yang berbeda. Tidak semua pemerintah daerah telah mendekati hubungan internasional dengan cara yang sama. Ada tiga lapisan paradiplomacy yaitu Lapisan *pertama* berkaitan dengan isu-isu ekonomi. Dalam konteks ini, sub negara pemerintah bertujuan membangun keberadaan internasional untuk tujuan menarik investasi asing, memikat perusahaan-perusahaan internasional ke wilayah tersebut, dan penargetan pasar baru untuk ekspor. Lapisan *kedua* dari

paradiplomacy melibatkan kerjasama (budaya, pendidikan, teknis, teknologi dan lainnya). Lapisan *ketiga* paradiplomacy melibatkan pertimbangan politik.⁹

Kemudian peneliti yang meneliti masalah *Paradiplomacy* antara lain, Stevani Ismawira Sinambela (2014) dalam tesisnya di S2 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengambil tema *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi kasus : Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang)*, bahwa Paradiplomasi telah menjadi hal penting dalam pertumbuhan kerjasama kawasan dan meningkatnya desentralisasi sistem internasional. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah dalam suatu negara demi mencapai kepentingan-kepentingan nasional di dunia internasional. Untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan kawasan baik itu se-kawasan maupun antar-kawasan menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah di tiap-tiap negara yang menghuni kawasan tersebut untuk saling berbagi dan saling menjaga dalam bingkai kerjasama demi mencapai kesejahteraan, keamanan bersama, dan cita-cita pembangunan.

Christy Damayanti dalam jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) dengan judul *Transformasi, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas Asean*, menyebutkan besarnya peranan para aparatur Daerah yang mengelola langsung kebijakan daerahnya dalam ranah Dunia Internasional.¹⁰

Dalam jurnal yang diterbitkan Forum of Federations, *Outlooks for the legal framing of paradiplomacy: the case of Brazil*, Marinana Andrade e Barros menyatakan dalam pandangannya bahwa paradiplomasi adalah alat penting untuk menegaskan kembali gagasan sebuah proyek nasional yang mencari pembangunan yang lebih besar dan otonomi lebih besar bagi sub-unit nya. Dalam konteks ini, pentingnya kerangka kelembagaan dan hukum yang ada pada pemerintah yang menjadi actor sub-nasional untuk membangun daerahnya tanpa berpangku tangan

⁹ Andre Lecours, 2008. *Discussion papers Political Issues of Paradiplomacy : Lessons from the Developed World*.

¹⁰ Christy Damayanti, 2012, "Potensi Paradiplomasi Dalam Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN", *Transformasi*, Vol.XIV, No 22.

terhadap kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi sesuai dengan aturan dan hukum nasional yang berlaku, sehingga menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.¹¹

Kemudian Paradiplomacy dilakukan oleh Takdir Ali Mukti, dalam buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia (2013)*, mengatakan bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun local, institusional maupun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama ‘kedaulatan’ suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan ‘share’ kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.¹²

Christy Damayanti menegaskan kembali bahwa paradiplomasi sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah daerah dalam bidang hubungan luar negeri mutlak diperlukan seiring dengan diterimanya paham diplomasi multijalur (multitrack diplomacy) sebagai tuntutan riil kehidupan hubungan internasional dalam iklim globalisasi dan demokrasi.¹³

Sidik Jatmika, dalam buku berjudul *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, mengatakan bahwa salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah seluas-luasnya adalah keinginan agar daerah diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan internasional. Hal ini merupakan bagian dari pertimbangan para pengambil keputusan dan merupakan salah satu jawaban dari tekanan yang berasal dari kejadian-kejadian eksternal dan desakan internal. Dimana kemudian otonomi daerah ini membawa peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan lingkungan

¹¹ Marinana Andrade e Barros, 2010, *Outlooks For the legal Framing Of Paradiplomacy: The Case Of Brazil, Federal Governance*, vol 7 no 3, pp.39-49.

¹² Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta.

¹³ Christy Damayanti, 2012, “Potensi Paradiplomasi Dalam Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN”, *Transformasi*, Vol.XIV, No 22

eksternal yakni dunia internasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan kawasan.¹⁴

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuka kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dan mampu bersaing di dunia internasional. Namun peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri yang bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam membangun daerah, akan tetapi pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri, akan tetapi membawa nama pemerintah nasional dan untuk itu Negara tidak akan kehilangan kedaulatannya.

Paradiplomacy merupakan alat penting dalam perkembangan kerjasama internasional antara pemerintah daerah dengan pihak asing untuk mempererat hubungan kerjasama. Hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak asing saling memberi keuntungan satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah daerah dalam suatu Negara demi mencapai kepentingan-kepentingan nasional di dunia internasional.

Studi tentang Praktik Paradiplomacy ini, penulis telah melengkapi pendapatnya Stefen Wolff bahwa paradiplomacy ini mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh entitas 'sub-state', atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Kemudian dari hal tersebut, maka pihak asing sebagai Negara yang lebih maju telah melakukan kerjasama dengan Negara berkembang untuk bisa lebih memajukan Negara berkembang.

¹⁴ Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

F. Hipotesis

Pemda DIY dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015 melalui proses kerjasama :

- A. Pra-Negosiasi Pemda DIY dengan Universitas Karlsruhe Jerman dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015
- B. Negosiasi Pemda DIY dengan Universitas Karlsruhe Jerman dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015
- C. Proses Perencanaan Kegiatan
- D. Pelaksanaan Kerjasama

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan fakta-fakta mengenai Praktek Paradiplomacy Pemda DIY dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai Praktek Paradiplomacy Pemda DIY dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015, maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai tahun 2004 yaitu terjadi fenomena telah dimulainya Pengeboran Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin dan dilaksanakannya penandatanganan kerjasama oleh pimpinan masing-masing lembaga yang berisi tentang kerjasama teknis pengelolaan air sungai bawah tanah di Gua Bribin, sedangkan 2015 terjadi fenomena pengembangan penyaluran Air Sungai Bawah Tanah dari Gua Bribin tersebut kemasyarakat Gunungkidul khususnya di Kecamatan Semanu. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY dan Gua Bribin Kabupaten Gunungkidul.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet terpercaya ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan Beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu :

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan focus penelitian, utamanya menyangkut Praktek Paradiplomacy Pemda DIY dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015.

b. Observasi

Observasi akan dilakukan dengan melalui pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan untuk mengetahui Praktek Paradiplomacy Pemda DIY dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Gua Bribin di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015.

c. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini pihak Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY yaitu Kepala sub Kerjasama Luar Negeri dan Staff sub bidang kerjasama Dalam Negeri.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data bertujuan untuk mengetahui potensi-potensi dan permasalahan yang akan menunjang data kualitatif. Proses analisis ini menggunakan data yang telah dikompilasi sehingga lebih memudahkan dalam analisis dan penyusunan tujuan perencanaan. Kemudian analisis yang digunakan dalam kegiatan survey lapangan di Pemda DIY yaitu analisis SWOT dengan kuadran hubungan-hubungannya (Matriks SWOT) yaitu *Strength-Opportunity*, *Strength-Threat*, *Weakness-Opportunity*, dan *Weakness-Threat*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, Tinjauan Pustaka, Hipotesa, Jenis Penelitian, Lokasi dan Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Dinamika Praktek Kerjasama Pemda DIY dengan Pihak Asing. Bab ini menjelaskan mengenai dimana saja Praktek Kerjasama Pemda DIY dengan pihak Asing tersebut dikerjakan.

BAB III, Kebijakan DIY dalam Pelaksanaan kerjasama dengan pihak asing. Bab ini mendiskripsikan mengenai kebijakan DIY dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak asing, kemudian bagaimana Pemda DIY melakukan *joint committee* dan *joint working group*.

BAB IV, Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Gua Bribin di Gunungkidul. Bab ini menguraikan tentang bagaimana proses kerjasama yang dilakukan Pemda DIY dalam kerjasama Penanganan Gua Bribin di Gunungkidul.

BAB V, Kesimpulan. Bab ini berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Zartman, William, *International Cooperation : The Extents and Limits of Multilateralism*, Cambridge University Press, 2010.
- Mukti, Takdir Ali, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta, 2013.
- Jatmika, Sidik, *Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional*, BIGRAF Publishing, 2001.
- Yulianti, Uli, *Manajemen Internasional: Suatu Tinjauan Sumberdaya Manusia*, UMM Press, Malang, 2006.
- Lecours, Andre, *Discussion Papers Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, 2008.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2014.
- Damayanti, Christy, “*Potensi Paradiplomasi Dalam Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*”, *Transformasi*, Vol.XIV, No 22, 2012.
- Outlooks for the legal framing of Paradiplomacy: The case of Brazil*”, *Federal Governance*, vol 7 no 3, pp. 39-49.
- Wawancara dengan penjaga bendungan Eksploitasi Air Sungai Bawah Tanah di Bribin II di Kecamatan Semanu, Kabupten Gunungkidul tanggal 23 Agustus 2015.
- <http://bppspam.com>